

BAB I
PENDAHULUAN
PERAN BATALYON 330 DALAM PENUMPASAN
PEMBERONTAKAN KAHAR MUZAKKAR TAHUN 1964-1965

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah modern Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh penjajahan Belanda serta pendudukan Jepang. Selama lebih dari tiga abad, Belanda menguasai Indonesia dengan sistem kolonial yang bersifat eksploitatif. Namun, pada tahun 1942, kekuasaan Belanda mulai berakhir dengan kedatangan Jepang. Meskipun pendudukan Jepang berlangsung singkat (1942-1945), hal ini memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan politik di Indonesia. Jepang menerapkan sistem militer dan menggerakkan masyarakat Indonesia demi mendukung usaha perang mereka. Walaupun demikian, pendudukan Jepang juga memicu semangat nasionalisme yang lebih kuat di kalangan rakyat Indonesia.¹

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II pada Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, deklarasi kemerdekaan ini tidak langsung diakui oleh Belanda, yang berusaha kembali menguasai Indonesia melalui aksi militer. Dalam kondisi ini, pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mendirikan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai awal mula berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI).² TKR bertugas melindungi kemerdekaan Indonesia dari usaha Belanda untuk menjajah kembali.

¹ George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1952), 109–115

² Robert Cribb, Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*, (Lanham: Scarecrow Press, 2004), hlm. 425

Setelah berbagai pertempuran melawan Belanda dalam agresi militer pertama (1947) dan kedua (1948), Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Sebagai bagian dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu implikasi dari bentuk negara ini adalah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sebagai kekuatan militer resmi negara.³

Periode antara 1945 sampai 1949 dikenal sebagai masa Revolusi Fisik, saat Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaannya melalui taktik gerilya dan diplomasi. Pada akhirnya, dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia meskipun dengan beberapa syarat, termasuk pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, RIS tidak bertahan lama, dan pada tahun 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan.⁴

Setelah pengakuan kedaulatan, Indonesia memasuki fase yang sarat dengan gejolak politik. Pada tahun 1950, sistem demokrasi parlementer mulai diterapkan, tetapi diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan frekuensi penggantian kabinet yang tinggi. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengakhiri sistem demokrasi parlementer dan menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin. Pada fase ini, kekuasaan terfokus pada Presiden Soekarno, dan peran militer semakin dominan dalam ranah politik nasional.⁵

Salah satu tantangan paling besar yang dihadapi Indonesia setelah merdeka adalah munculnya berbagai gerakan separatisme di berbagai wilayah. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat, baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Beberapa gerakan separatisme yang terkenal meliputi Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan, serta Pemberontakan

³ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 280-285

⁴ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Angkasa, 1977), 412–418

⁵ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1962), 561–570

Republik Maluku Selatan (RMS).⁶

Setelah berbagai pertempuran melawan Belanda dalam agresi militer pertama (1947) dan kedua (1948), Indonesia akhirnya memperoleh pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Sebagai bagian dari hasil Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Salah satu implikasi dari bentuk negara ini adalah pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) sebagai kekuatan militer resmi negara.⁷ Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) merupakan pendahulu TNI yang terbentuk pada masa RIS. APRIS memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan negara, khususnya dalam menghadapi berbagai gerakan separatis dan pemberontakan. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, APRIS berhasil mempertahankan integrasi nasional dan menjadi tulang punggung bagi pertahanan Indonesia.

Meskipun telah menyumbangkan peran yang signifikan, APRIS juga menghadapi sejumlah masalah dan kritik. Beberapa dari kritik ini terkait dengan p aduan kekuasaan militer yang terpusat, praktik korup, serta pelanggaran hak asasi manusia selama operasi militer. Walau begitu, umumnya APRIS dilihat sebagai lembaga yang sangat krusial dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara. Pembentukan APRIS menimbulkan berbagai masalah, terutama yang berkaitan dengan penggabungan kekuatan militer dari berbagai kelompok pejuang ke dalam satu struktur komando yang lebih teratur. Banyak mantan komandan laskar dan bekas pejuang yang merasa tidak puas dengan kebijakan pengintegrasian ini, terutama karena mereka kehilangan posisi komando strategis dalam struktur militer yang baru. Salah satu tokoh yang merasa kecewa dengan kebijakan ini adalah Kahar Muzakkar.⁸

Abdul Kahar Muzakkar merupakan seorang figur militer dan politik asal

⁶ C. van Dijk, *Rebellion under the Banner of Islam* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), 85–92

⁷ Markas Besar Angkatan Darat, *Sejarah TNI AD 1945–1950* (Jakarta: Disjarahad, 1991), 201–207

⁸ Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945–1967* (Oxford: Oxford University Press, 1982), 78–83

Sulawesi Selatan. Ia adalah mantan anggota Tentara Republik Indonesia (TRI) yang berjuang melawan Belanda selama Revolusi Fisik. Namun, setelah kemerdekaan, Kahar Muzakkar merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah pusat, terutama mengenai integrasi pasukan gerilya ke dalam TNI. Ia menuntut agar pasukan gerilya di Sulawesi Selatan diakui sebagai bagian resmi dari TNI, tetapi tuntutan tersebut tidak sepenuhnya terwujud.⁹

Ketidakpuasan Kahar Muzakkar mencapai puncaknya pada tahun 1950 ketika ia menuntut agar eks-laskar pejuang yang dipimpinnya diterima dalam APRIS tanpa melalui seleksi formal. Tuntutan ini ditolak oleh pemerintah pusat, yang menginginkan proses integrasi yang lebih ketat dan terkendali. Pada tahun 1951, Kahar Muzakkar mendeklarasikan dirinya sebagai bagian dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di wilayah Sulawesi Selatan. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mendirikan sebuah negara Islam di Indonesia sambil menentang pemerintah pusat yang dinilai sekuler dan tidak adil.¹⁰ Pemberontakan yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar ini berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun, menyebabkan banyak korban jiwa dan kerugian materil yang signifikan.¹¹

Pemberontakan yang dipimpin Kahar Muzakkar tidak hanya menjadi persoalan keamanan di Sulawesi Selatan, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap integrasi nasional.¹² Gerakan ini memperoleh dukungan dari beragam kelompok yang merasa tidak puas dengan pemerintah pusat, termasuk bekas pejuang gerilya dan kelompok-kelompok Islam ekstremis. Dalam upaya mengatasi pemberontakan ini, pemerintah Indonesia, melalui TNI, berjuang keras, meskipun usaha ini memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan berlangsung cukup lama, dari tahun 1950 hingga 1965. Selama periode ini, berbagai operasi militer

⁹ Eril Aqamuz (Siti Maesaroh), *Profil Abdul Qahar Muzakkar* (Tangerang: Yayasan Al-Abrar, 2007), 41–46

¹⁰ C. Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, hal 115-120.

¹¹ Pradata Ardi Saputro, "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sulawesi Selatan pada Masa Gerakan Abdul Qahhar Muzakkar," *Nagri Pustaka* Vol. 1, No. 1 (Juni 2023): 15–16

¹² A. Wanus Tangke dan Anwar Nasyaruddin, *Sejarah Tertembaknya Kahar Muzakkar di Hutan* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2006), 19–27

dilakukan untuk menumpas gerakan tersebut, termasuk oleh Batalyon 330 yang memiliki peran strategis dalam operasi-operasi penumpasan DI/TII di wilayah Sulawesi Selatan.

Batalyon 330 merupakan salah satu unit militer TNI yang dibentuk secara khusus untuk menangani pemberontakan di Sulawesi Selatan. Unit ini terdiri dari personel yang terlatih serta berpengalaman dalam operasi kontrainsurjensi. Struktur komando Batalyon 330 dirancang untuk memfasilitasi koordinasi yang efisien dengan pasukan lain dan pemerintah daerah. Batalyon 330 merupakan bagian dari Komando Pasukan Siliwangi (KPS) yang terkenal dengan kemampuannya dalam perang gerilya dan operasi kontra-pemberontakan.¹³ Dalam menghadapi pemberontakan Kahar Muzakkar, Batalyon 330 diterjunkan dalam berbagai operasi militer di hutan-hutan Sulawesi Selatan untuk memburu dan melemahkan kekuatan DI/TII. Dalam usaha memberantas pemberontakan Kahar Muzakkar, Batalyon 330 menerapkan berbagai strategi dan taktik. Strategi yang diterapkan oleh Batalyon 330 meliputi pendekatan militer dan psikologis. Secara militer, mereka menggunakan strategi *search and destroy* untuk menemukan dan menghancurkan basis-basis pemberontak. Sementara itu, pendekatan psikologis dilakukan dengan upaya propaganda untuk melemahkan moral para pengikut Kahar Muzakkar, serta mendorong mereka untuk menyerah atau bergabung dengan pemerintah.¹⁴ Selain menjalankan operasi militer secara konvensional, Batalyon ini juga melaksanakan operasi intelijen guna mengidentifikasi dan menetralkan jaringan para pemberontak. Lebih dari itu, Batalyon 330 mengambil bagian dalam usaha "winning the hearts and minds" dengan mendekati masyarakat sipil untuk mengurangi dukungan yang mereka berikan kepada para pemberontak.

Berkat kerja keras Batalyon 330 dan pasukan TNI lainnya, pemberontakan Kahar Muzakkar dapat dipadamkan pada tahun 1965. Kahar Muzakkar tewas dalam serangan militer, sementara anggotanya yang tersisa menyerah atau melarikan diri. Penumpasan pemberontakan ini menjadi kemenangan signifikan

¹³ Disjarahad Kodam III/Siliwangi, *Sejarah Pasukan Siliwangi* (Bandung, 2003), 214–219

¹⁴ Abdul Haris Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*, (Jakarta: Gunung Agung, 1989), 145-147

bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga integrasi nasional. Pemberontakan Kahar Muzakkar dapat dipandang sebagai salah satu titik penting dalam perjalanan sejarah Indonesia setelah merdeka. Insiden ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan di Sulawesi Selatan, tetapi juga persatuan nasional. Dalam hal ini, Batalyon 330, sebagai salah satu elemen TNI, mengambil peran penting dalam menangani pemberontakan tersebut. Melalui berbagai strategi dan metode, Batalyon 330 berhasil menghentikan konflik dan mengembalikan stabilitas di Sulawesi Selatan. Keberhasilan misi ini bukan hanya menggambarkan kemampuan tempur TNI, tetapi juga menunjukkan pentingnya strategi yang menyeluruh dalam menghadapi gerakan separatis.¹⁵

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menelusuri Peran Batalyon 330 dalam Penumpasan Pemberontakan Kahar Muzakkar Tahun 1964-1965. Untuk pengambilan tahun 1964-1965 menjadi batasan dalam kajian karya ilmiah ini, dimana tahun 1964 awal keterlibatan resmi Batalyon 330 dalam operasi penumpasan gerakan Kahar Muzakkar di bawah komando Kodam XIV Hasanuddin dan di tahun 1965 menandai akhir dari pemberontakan Kahar Muzakkar. Hingga akhirnya terbuatlah judul “Peran Batalyon 330 dalam Penumpasan Pemberontakan Kahar Muzakkar Tahun 1964-1965”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pembentukan Batalyon 330 Kujang I/Siliwangi?
2. Bagaimana Peran Batalyon 330 dalam Penumpasan Pemberontakan Kahar Muzakkar Tahun 1964-1965?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi Pembentukan Batalyon 330 Kujang I/Siliwangi
2. Mengidentifikasi Peran Batalyon 330 dalam Penumpasan Pemberontakan Kahar Muzakkar Tahun 1964-1965

¹⁵ Sejarah DAM XIV/Hasanuddin, *Operasi Penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar* (Makassar, 1983), 145–152

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka, yang juga dikenal sebagai studi pustaka, kajian literatur, tinjauan literatur, dan berbagai sebutan lain, meskipun memiliki istilah yang berbeda, tetap mengandung makna yang serupa. Kajian pustaka adalah proses eksplorasi, analisis, dan identifikasi pengetahuan yang terdapat dalam literatur (sumber bacaan, buku referensi, atau hasil penelitian lainnya) yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Asumsi yang mendasari studi literatur adalah bahwa setiap kegiatan penelitian dimulai dari pengetahuan yang sudah ada, kemudian dikembangkan untuk memperoleh informasi terkini. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa kajian pustaka terdiri dari dua elemen utama, yaitu penelusuran penelitian sebelumnya dan landasan teori.¹⁶ Di antara karya tulis yang digunakan peneliti dalam tahapan tinjauan pustaka sebagai berikut

- 1) Tesis yang berjudul *Kehidupan Sosial Perempuan Pada Masa Pemberontakan Kahar Muzakkar Di Sulawesi Selatan, 1953-1965* karya Nurul Azizah pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Topik kajian dalam pembahasan ini sama yakni mengenai Pemberontakan Kahar Muzakkar yang pada karya ini lebih terfokuskan pada kehidupan sosial Perempuan di masa tersebut. Dilihat dari karya tersebut tidak disinggung profil maupun peran Batalyon 330, sehingga membuat penulis menjadikan topik penelitian dengan objek kajian secara khusus tentang Pemberontakan Kahar Muzakkar.
- 2) Skripsi yang berjudul *Peranan Kahar Muzakkar Dalam Pemberontakan DI/TII Di Sulawesi Selatan* karya Eka Susanti pada tahun 2016 dari Universitas Lampung. Dalam skripsi ini, topik yang dimunculkan adalah dari peran Kahar Muzakkar sebagai pemimpin dalam Pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan sehingga fokus pembahasannya tidak menyinggung pembahasan dalam topik yang diangkat penulis lebih berfokus pada bidang ilmu sejarah.

¹⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)

3) Skripsi yang berjudul *Peran Batalyon Infanteri 328 Tni Ad Dalam Penumpasan Pemberontakan Di Indonesia Tahun 1958 – 1969* karya Risma Yunita pada tahun 2023 dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dilihat dari karya tersebut, topik ini menyoroti tentang Peran Batalyon Infanteri 328. Dalam kehadirannya, batalyon infanteri itu berfungsi sebagai satuan tempur dasar yang bertugas untuk mengamankan wilayah, mendukung pembangunan, dan menguasai kedudukan musuh. Hal tersebut menjadi dorongan bagi penulis untuk mengambil permasalahan yang serupa dengan objek yang berbeda yakni tentang Batalyon 330 dengan pengkajian Pemberontakan Kahar Muzakkar.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian sejarah adalah suatu cara sistematis yang digunakan untuk mempelajari kejadian-kejadian masa lalu dengan tujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan kejadian tersebut secara tepat dan objektif. Metode ini meliputi pengumpulan, verifikasi, analisis, dan sintesis data sejarah untuk menghasilkan rekonstruksi masa lalu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian sejarah tidak hanya berfungsi untuk menceritakan "apa yang terjadi", tetapi juga menjawab "mengapa dan bagaimana" suatu kejadian berlangsung, serta dampaknya terhadap masyarakat dan era tersebut. Metode penelitian sejarah adalah "metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan mengenai masa lalu yang bersifat kemanusiaan dengan menganalisis sumber-sumber sejarah yang tersedia."¹⁷ Metode ini bersifat kritis karena melibatkan proses verifikasi dan interpretasi terhadap sumber-sumber sejarah untuk menghindari bias dan subjektivitas.

1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Tahap pertama dalam metode penelitian sejarah adalah heuristik. Dari segi etimologi, istilah heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein*,

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 45.

yang memiliki arti mencari dan menemukan sumber. Sedangkan dalam terminologi, heuristik merupakan fase penjajakan, pencarian, penelusuran, serta pengumpulan sumber sejarah, baik dalam bentuk tertulis, lisan, atau benda.¹⁸

Dalam proses penyusunan penelitian mengenai Peran Batalyon 330 dalam Penumpasan Pemberontakan Kahar Muzakkar antara tahun 1964 hingga 1965, penulis telah melakukan metode heuristik mulai dari pencarian, penemuan, hingga pengumpulan sumber-sumber yang akan digunakan sebagai rujukan dalam penulisan ini. Sumber yang digunakan dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber-sumber yang diperoleh secara langsung dari saksi atau pelaku sejarah yang menyaksikan, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa sejarah. Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari individu yang hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain atau tidak benar-benar menjadi saksi serta pelaku dalam suatu peristiwa sejarah.¹⁹

Metode pencarian sumber dalam kajian mengenai Peran Batalyon 330 dalam Penumpasan Pemberontakan Kahar Muzakkar ini menggunakan metode studi pustaka dan lapangan. Dalam melakukan tahap heuristik, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang dibutuhkan. Adapun tempat yang dikunjungi adalah sebagai berikut :

- a. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- b. Perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora
- c. Perpustakaan Batu api
- d. Perpustakaan Pusat Disjarahad
- e. Museum Mandala Wangsit Siliwangi

Hal ini merujuk pada periode waktu yang diambil yakni 1964-1965.

¹⁸ Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 93

¹⁹ Nina Helina Lubis, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2008), 24-27

Oleh karena itu, pada periode 1 tahun ke belakang memerlukan adanya dokumen tertulis sebagai sumber primer, sementara untuk periode 1 tahun atau kontemporer, dibutuhkan sumber lisan dari para pelaku maupun saksi sejarah sebagai sumber primer. Studi literatur yang dilakukan mencakup pencarian sumber dalam bentuk buku di perpustakaan serta informasi dari arsip atau dokumen langsung di balai dokumen dan perpustakaan pusat Disjarahad. Di antara sumber yang diperoleh sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Dalam mencari informasi mengenai Kontribusi Batalyon 330 dalam Penanggulangan Pemberontakan Kahar Muzakkar pada tahun 1964-1965, penulis berhasil menemukan sumber-sumber utama yang dapat digunakan sebagai referensi sejarah. Sumber utama yang diperoleh meliputi dokumen, tulisan, dan gambar.

1) Dokumen

- a) Sejarah DAM XIV/Hasanuddin. 1983. *Operasi Penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar.*
- b) Sejarah Militer Daerah Militer XIV/HN. *Operasi Penumpasan Keamanan Di Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara*
- c) Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. *Operasi Penumpasan Pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar Di Sulawesi Selatan dan Tenggara*
- d) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). *Koleksi DI/TII Sulawesi Selatan, laporan situasi keamanan dan operasi militer 1950–1965.* Jakarta: ANRI.
- e) Markas Besar Angkatan Darat Dinas Sejarah. 2018. *Bab VII Buku B Penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar.* Dinas Sejarah Angkatan Darat

- f) Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad). Hasil Puldok Operasi Kahar Muzakkar, 2018. Arsip Operasi, Jakarta.
 - g) Markas Besar Angkatan Darat (MBAD). Petunjuk Pelaksanaan Operasi Penumpasan DI/TII di Sulawesi Selatan, 1964. Arsip MBAD, Jakarta.
 - h) Markas Kodam XIV/Hasanuddin. Laporan Situasi Wilayah Operasi Sulawesi Selatan, 1964–1965. Arsip Kodam XIV/Hasanuddin, Makassar.
 - i) Dinas Sejarah Angkatan Darat. *Operasi Penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan*. Jakarta: Disjarahad, 2018.
 - j) Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), *Sejarah Singkat Yonif Linud 330/Kujang I*, Arsip Satuan Yonif 330, Bandung
- 2) Buku
- a) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Doktrin Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*. Jakarta: Mabes TNI AD, 2019.
 - b) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Organisasi dan Administrasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*. Jakarta: Mabes TNI AD, 2011.
 - c) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Pembinaan Personel Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat*. Jakarta: Mabes TNI AD, 2010.
 - d) Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. *Peran TNI dalam Operasi Militer Selain Perang*. Jakarta: Dispenad, 2008.

- e) Dinas Sejarah Kodam VI/Siliwangi. *Siliwangi Masa ke Masa*. Cetakan ke-2. Bandung: Disjarah Kodam VI/Siliwangi, 1979.
- f) A.H. Nasution, *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Republik Indonesia*. Jakarta: Angkasa, 1953.
- g) A.H. Nasution, *Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Seruling Masa, 1968.
- h) Bahar Mattalioe, *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan: DI/TII Sulawesi Selatan 1950–1965*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- i) A.H. Nasution *Memenuhi Panggilan Tugas Jilid I*. Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- j) A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1977.
- k) Jo' Kojongjan. *Mengenang Perjuangan Bersama Abdul Qahhar Muzakkar dan J.W. Gerungan*. Gowa: Yayasan La Galigo Multi Media, 2010
- l) A. Wanua Tangke. *Kahar Muzakkar Masih Hidup (Sebuah Misteri)*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2001.
- m) A. Wanua Tangke, dan Anwar Nasyaruddin. *Sejarah Tertembaknya Kahar Muzakkar di Hutan*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2006.
- n) Himawan Soetanto, *Merebut Polewali: Raids Batalyon Para Raider 330 "Kujang I" Siliwangi* (Bandung: Disjarahad, 2006),
- o) Himawan Soetanto, *Sejarah Divisi Siliwangi*, (Bandung: Disjarahad, 1991)
- p) Pusat Sejarah TNI AD, *Sejarah Perkembangan Infanteri TNI AD* (Jakarta: Disjarahad, 2000)

3) Foto

- a) Kahar Muzakkar
- b) Kahar Muzakkar bersama staf menghadiri pelantikan KGSS menjadi CTN pada 24 Maret 1951
- c) Kahar Muzakkar Komandan KGSS ketika dilantik menjadi CTN pada 24 Maret 1951
- d) Barak yang digunakan sebagai tempat tinggal Kahar Muzakkar di sebelah Barat Bone Petu
- e) Istri Kahar Muzakkar, Corry Van Stenus menemui TNI
- f) Surat Penetapan TKR berganti nama menjadi TII
- g) Kompi D YON 330/Kujang I berhasil mengakhiri pemberontakan Kahar Muzakkar
- h) Rakyat membantu mengangkut mayat Kahar Muzakkar
- i) Senjata-senjata gerombolan DI/Kahar Muzakkar dapat dirampas oleh RTP Merah
- j) Mayat Kahar Muzakkar
- k) Letkol Kahar Muzakkar beserta anak buah sebelum menggabungkan kepada Negara Islam Indonesia

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah sumber sejarah yang diperoleh dari keterangan seseorang yang tidak menyaksikan dan tidak hidup pada masa yang sama dengan peristiwa itu.

1) Buku

- a) Mohammad Natsir Sitonda. 2012. *Intergrasi Gerilya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*. Makassar: Yayasan Pendidikan Mohammad Natsir
- b) Eril Aqamuz (Siti Maesaroh). 2007. *Profil Abdul Qahar Muzakkar*. Tangerang: Yayasan Al-Abrar
- c) Prof. Dr. Suwelo Hadiwijoyo. 2013. *Kahar Muzakkar dan Kartosoewirjo*. Jogjakarta: Palapa
- d) Harold Crouch. 1978. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- e) C. van.Dijk. 1981. *Rebellion under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff
- f) Herbert Feith. 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press,
- g) Barbara S. Harvey. 1977. *Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950–1965*. Ithaca: Cornell University Press.
- h) Nugroho Notokusanto. 1985. *Tentara Nasional Indonesia dalam Perang dan Politik*. Jakarta: Gramedia
Nugroho Notokusanto. 1979. *Masalah Hankam dan Sejarah TNI*. Jakarta: UI Press
- i) Nugroho Notokusanto. 1979. *Tentara PETA pada Zaman Pendudukan Jepang*. Jakarta: Gramedia
- j) Ulf Sundhaussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945–1967*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1982.
- k) Anhar Gonggong. *Kahar Muzakkar: Dari Patriot Hingga*

Pemberontak. Jakarta: Gramedia, 1992.

- l) Mattulada. *Sejarah, Masyarakat, dan Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1998.
- m) Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- n) M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1200*. Edisi ke-4. Stanford: Stanford University Press, 2008.
- o) Audrey R. Kahin. *Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity*. Amsterdam: 1999
- p) Sartono Kartodirdjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1900–1942*. Jakarta: Gramedia, 1993.
- q) Barbara S. Harvey. *Permesta: Half a Rebellion*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1977.
- r) David Galula. *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*. New York: Praeger, 1964.
- s) George McTurnan Kahin. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1952
- t) Taufik Abdullah. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008
- u) Andi Achdian, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2010)
- v) Anthony Reid, *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450–1680: The lands below the winds* New Haven: Yale University Press, 1988),
- w) David Kilcullen, *Counterinsurgency* (Oxford: Oxford University Press, 2010
- x) Martin van Creveld, *Supplying War: Logistics from Wallenstein to*

- Patton* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977)
- y) Himawan Soetanto, *Strategi Pertahanan Keamanan Nasional* (Jakarta: Sinar Harapan, 1989),
- z) Salim Said, *Militer Indonesia dan Politik*, ed. revisi (Jakarta: LP3ES, 2001),
- aa) Benedict R. O’G. Anderson, *Java in a Time of Revolution* (Ithaca: Cornell University Press, 1972),
- bb) Himawan Soetanto, *Konsepsi Pertahanan Keamanan Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984),
- cc) Salim Said, *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military* (Singapore: ISEAS, 1991),
- dd) Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), *Sejarah Singkat Yonif Linud 330/Kujang I*, Arsip Satuan Yonif 330, Bandung
- ee) Markas Besar TNI Angkatan Darat, *Manajemen Logistik TNI AD* (Jakarta: Mabes TNI AD, 2012)
- ff) Edi S. Ekadjati, *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995),
- gg) Robert Thompson, *Defeating Communist Insurgency: Experiences from Malaya and Vietnam* (London: Chatto & Windus, 1966)
- hh) Anton Dwi Laksono, *Apakah itu Sejarah: pengertian, ruang lingkup, metode dan penelitian*, (Pontianak: Derwati Press, 2018)
- ii) Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik* (Gresik: CV Jendela Sastra Indonesia Press, 2020)
- jj) Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah: Teori, Metode, Contoh Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 93
- kk) Nina Helina Lubis, *Metode Sejarah* (Bandung: Satya Historika, 2008), 24-27
- ll) Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013),
- mm) Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia, 2004)
nn) Robert Cribb, Audrey Kahin, *Historical Dictionary of Indonesia*,
(Lanham: Scarecrow Press, 2004),

2. Kritik Sumber (Verifikasi)

Kritik merupakan tahap di mana peneliti akan memilih dan mengolah sumber-sumber. Tahap ini ada untuk memperoleh sumber yang asli dan dapat dipercaya. Dalam prosesnya, peneliti akan memilih sumber-sumber yang telah diperoleh sebelumnya untuk menentukan yang mana yang pantas digunakan dalam penelitian.²⁰ Serangkaian proses kritik ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang paling relevan dan yang paling dapat diandalkan. Tahap kritik dibagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal yang berfungsi sebagai penguji atau penyaring sumber berdasarkan keadaan fisiknya. Proses pengujian ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan keaslian sumber. Kemudian ada kritik internal yang berfungsi untuk menyaring konten dari topik yang dibahas, apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak, proses ini dilakukan untuk menilai kredibilitas sumber. Dengan melaksanakan tahap kritik, sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap awal (heuristik) akan lebih kuat untuk dijadikan sebagai referensi utama penelitian.²¹

a. Kritik Ekstern

Kritik Ekstern ini menyangkut keaslian ataupun keautentikan bahan yang digunakan dalam pembuatan sumber Sejarah, seperti prasasti, dokumen dan naskah.

1) Dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam kajian ini seluruhnya bersumber dari Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad). Secara

²⁰ Nina Helina Lubis, *Metode Sejarah.*, hal. 7

²¹ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah.*, hal. 104

fisik, dokumen-dokumen tersebut disajikan dalam format yang relatif seragam, yakni menggunakan kertas berukuran kurang lebih F4. Sebagian besar dokumen telah dijilid dengan jilid tebal dan kokoh, menunjukkan bahwa dokumen tersebut merupakan hasil pengelolaan arsip institusional yang sistematis dan ditujukan untuk penggunaan jangka panjang.

Dari segi kondisi fisik, kualitas dokumen yang digunakan menunjukkan variasi. Beberapa dokumen berada dalam kondisi sangat baik, terutama dokumen-dokumen hasil puldok Operasi Kahar Muzakkar, di mana tulisan dan tinta masih jelas serta mudah dibaca. Namun demikian, terdapat pula dokumen yang menunjukkan penurunan kualitas, khususnya pada dokumen-dokumen yang belum dijilid tebal. Pada dokumen jenis ini, ditemukan tulisan yang mulai luntur dan tinta yang tidak lagi sejelas saat pertama kali disusun.

Seiring dengan perkembangan sistem pengarsipan, sebagian besar dokumen tersebut telah dialihmediakan ke dalam bentuk data digital. Digitalisasi ini memberikan keuntungan signifikan bagi peneliti karena memungkinkan pembacaan dokumen secara lebih jelas melalui sistem komputer, terutama ketika teks pada dokumen fisik mulai sulit dikenali secara visual. Dengan adanya versi digital, keterbacaan dokumen meningkat dan risiko kesalahan pembacaan dapat diminimalkan.

Dari segi aksesibilitas, dokumen-dokumen tersebut memiliki tingkat keterbukaan yang beragam. Sebagian dokumen dapat diakses secara bebas oleh pengunjung di Perpustakaan Pusat Disjarahad, sementara sebagian lainnya tergolong arsip terbatas yang hanya dapat diakses dengan izin khusus berupa surat resmi dan disimpan di balai dokumen Disjarahad. Meskipun demikian, secara umum kondisi

dokumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan masih sangat baik dan layak dijadikan sumber primer.

Selain dokumen yang telah dijilid, kajian ini juga memanfaatkan arsip-arsip lepas yang bersumber langsung dari Disjarahad. Arsip-arsip ini umumnya masih menggunakan kertas berukuran F4, namun secara fisik berada dalam kondisi yang kurang baik dibandingkan dokumen. Arsip-arsip tersebut sebagian besar tidak dijilid, melainkan hanya dijepit menggunakan penjepit kertas dan disimpan dalam map-map yang telah diberi judul sesuai dengan isi arsip.

Kualitas kertas arsip relatif lebih rapuh dan tidak sekokoh kertas dokumen resmi. Bahkan, beberapa arsip menggunakan jenis kertas yang sudah sangat tipis, hampir transparan, dengan kondisi tinta yang telah memudar secara signifikan. Pada beberapa arsip, ketebalan tinta diperkirakan telah berkurang hingga sekitar 60%, sehingga menyulitkan proses pembacaan. Kondisi ini menuntut kehati-hatian ekstra dalam proses analisis dan interpretasi isi arsip.

Meskipun demikian, keberadaan arsip-arsip tersebut tetap memiliki nilai historis yang tinggi karena memuat informasi langsung terkait situasi keamanan dan operasi militer pada masa pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar. Oleh karena itu, baik dokumen maupun arsip dari Disjarahad digunakan secara selektif dan dikombinasikan dengan sumber lain guna menjaga akurasi dan objektivitas analisis sejarah.

2) Buku

Buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini, baik yang dikategorikan sebagai sumber primer maupun sumber sekunder, secara umum memenuhi syarat keabsahan sumber sejarah apabila ditinjau melalui kritik ekstern. Buku-buku tersebut berasal dari penerbit resmi, lembaga negara, serta penulis yang memiliki otoritas

keilmuan maupun pengalaman langsung terkait dengan peristiwa yang dikaji, yaitu pemberontakan DI/TII Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan.

Sebagian besar buku primer merupakan terbitan lembaga militer resmi, seperti Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), Markas Besar Angkatan Darat, Markas Kodam XIV/Hasanuddin, serta unit sejarah satuan seperti Disjarah Kodam VI/Siliwangi. Buku-buku tersebut memiliki identitas penerbit yang jelas, tahun terbit yang dapat diverifikasi, serta latar institusional yang relevan dengan konteks sejarah penumpasan DI/TII. Keberadaan buku-buku ini di perpustakaan resmi militer, seperti Perpustakaan Disjarahad dan arsip satuan, semakin memperkuat legitimasi eksternal sumber karena menunjukkan bahwa buku tersebut merupakan bagian dari dokumentasi resmi negara.

Selain itu, karya-karya tokoh militer seperti A.H. Nasution juga memiliki nilai eksternal yang kuat karena ditulis oleh pelaku sejarah yang terlibat langsung dalam perumusan doktrin dan kebijakan militer pada masa revolusi dan pascakemerdekaan. Identitas penulis, reputasi intelektual, serta konteks waktu penulisan menjadikan karya-karya tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber primer yang sah. Buku-buku lokal seperti karya Jo' Kojongjan, A. Wanua Tangke, serta A. Wanus Tangke dan Anwar Nasyaruddin juga lolos kritik ekstern karena diterbitkan oleh penerbit yang jelas dan ditulis oleh penulis yang memiliki kedekatan langsung dengan wilayah, komunitas, dan peristiwa yang diteliti.

Sementara itu, buku-buku yang dikategorikan sebagai sumber sekunder sebagian besar merupakan karya akademik yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional maupun internasional, seperti Cornell University Press, Martinus Nijhoff, Oxford University Press,

Gramedia, LP3ES, dan Balai Pustaka. Penulisnya adalah sejarawan, ilmuwan politik, dan peneliti yang memiliki rekam jejak akademik yang diakui, seperti Harold Crouch, C. van Dijk, Barbara S. Harvey, Ulf Sundhaussen, Anhar Gonggong, dan Sartono Kartodirdjo. Dari sisi kritik ekstern, buku-buku ini dapat dipertanggungjawabkan karena melalui proses akademik, penyuntingan ilmiah, serta didukung oleh metodologi penelitian yang jelas.

3) Foto

Foto-foto yang digunakan dalam kajian ini seluruhnya bersumber dari Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), sehingga secara kelembagaan memiliki tingkat keaslian dan legitimasi yang tinggi. Disjarahad merupakan institusi resmi TNI Angkatan Darat yang berwenang dalam pengelolaan, pendokumentasian, serta pelestarian arsip sejarah militer Indonesia. Dengan demikian, sumber foto yang digunakan dapat dipastikan berasal dari dokumentasi resmi dan bukan hasil reproduksi tidak sah.

Kondisi fisik foto-foto tersebut menunjukkan tingkat keberagaman, terutama dari segi kualitas visual, kejelasan gambar, dan kondisi tinta. Sebagian foto masih berada dalam kondisi sangat baik dan jelas, seperti foto potret Kahar Muzakkar, sehingga memungkinkan identifikasi visual yang relatif akurat. Namun, terdapat pula foto-foto lain yang kualitasnya menurun akibat faktor usia arsip, kondisi penyimpanan, serta degradasi tinta, sehingga detail gambar tidak sepenuhnya terlihat dengan jelas.

Dalam perkembangannya, sumber-sumber foto tersebut telah dialihmediakan ke dalam bentuk digital dan menjadi bagian dari koleksi arsip digital Disjarahad. Hal ini memungkinkan peneliti dan pengunjung untuk mengakses dokumen visual tersebut secara lebih

mudah tanpa harus berhadapan langsung dengan arsip fisik yang rentan terhadap kerusakan. Digitalisasi ini juga memperkuat aspek autentisitas karena dilakukan oleh lembaga resmi yang memiliki otoritas atas arsip tersebut.

Selain arsip digital, terdapat pula buku-buku khusus yang diterbitkan oleh Disjarahad dan institusi militer lainnya yang memuat dokumentasi visual mengenai gerakan DI/TII di Indonesia, termasuk peristiwa DI/TII di Sulawesi Selatan. Keberadaan dokumentasi foto baik dalam arsip digital maupun cetak menunjukkan kesinambungan pengelolaan sumber visual oleh institusi resmi.

b. Kritik Intern

1) Dokumen

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam kajian ini pada umumnya menyajikan informasi yang tersusun secara sistematis dan runtut. Struktur penyajian dokumen biasanya berbentuk narasi kronologis yang disusun menyerupai format buku resmi. Sebagian besar dokumen diawali dengan keterangan administratif, seperti profil pejabat atau Kepala Dinas (Kadis) yang menjabat pada periode tertentu, kemudian dilanjutkan dengan daftar isi yang rinci dan terstruktur. Pola penyajian ini menunjukkan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun secara formal dan ditujukan sebagai laporan institusional, bukan sekadar catatan lepas.

Isi dokumen umumnya memuat uraian mengenai latar belakang operasi, tujuan pelaksanaan, wilayah operasi, satuan yang terlibat, hingga hasil dan evaluasi kegiatan. Informasi disampaikan secara kronologis, sehingga memudahkan peneliti untuk menelusuri tahapan peristiwa secara berurutan. Sebagai contoh, dokumen *Operasi*

Penumpasan Keamanan di Daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara secara eksplisit menjelaskan rangkaian operasi penumpasan yang dilakukan oleh aparat militer di wilayah tersebut, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Meskipun demikian, dari sisi kritik intern perlu dicermati bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun oleh institusi militer yang secara langsung terlibat dalam konflik. Hal ini berimplikasi pada kecenderungan narasi yang menempatkan operasi militer sebagai tindakan yang sah, rasional, dan diperlukan demi menjaga stabilitas keamanan negara. Gerakan DI/TII dan tokoh Kahar Muzakkar secara konsisten digambarkan sebagai ancaman terhadap keamanan dan keutuhan negara, tanpa memberikan ruang yang memadai untuk menjelaskan latar belakang sosial, politik, dan kultural yang melatarbelakangi munculnya perlawanan tersebut.

Selain itu, dokumen-dokumen ini cenderung menekankan keberhasilan operasi dan loyalitas aparat militer, sementara aspek-aspek seperti dampak sosial terhadap masyarakat sipil, dinamika hubungan antara aparat dan penduduk lokal, serta kemungkinan adanya kekerasan non-tempur tidak selalu diungkapkan secara mendalam. Dengan demikian, dokumen tidak sepenuhnya netral, melainkan merepresentasikan sudut pandang negara dan institusi militer sebagai aktor dominan dalam narasi sejarah.

Namun demikian, kelebihan utama dokumen-dokumen Disjarahad terletak pada kekayaan data faktual yang disajikan. Informasi mengenai nama operasi, wilayah gerak pasukan, satuan yang terlibat, struktur komando, serta kronologi tindakan militer memberikan dasar empiris yang kuat bagi penelitian sejarah militer. Data-data ini memiliki nilai penting untuk merekonstruksi jalannya operasi penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar secara detail dan terukur.

2) Buku

Meskipun buku-buku yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kredibilitas eksternal yang tinggi, khususnya buku-buku terbitan Markas Besar Angkatan Darat Dinas Sejarah, isi dan narasi yang disajikan tetap perlu dianalisis secara kritis melalui kritik intern. Buku-buku militer tersebut pada dasarnya disusun sebagai bagian dari dokumentasi resmi institusi negara, sehingga sudut pandang yang digunakan cenderung merepresentasikan kepentingan dan logika negara dalam memaknai konflik DI/TII Kahar Muzakkar. Narasi penumpasan sering kali diletakkan dalam kerangka menjaga stabilitas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga pemberontakan DI/TII diposisikan secara normatif sebagai ancaman keamanan yang harus ditumpas.

Dalam buku-buku terbitan militer, strategi dan taktik operasi penumpasan digambarkan secara sistematis dan teknis, mulai dari pembagian wilayah operasi, penggunaan pasukan lintas satuan, hingga keberhasilan operasi militer. Namun, aspek sosial, kultural, dan psikologis masyarakat Sulawesi Selatan yang menjadi basis dukungan Kahar Muzakkar relatif kurang mendapat perhatian yang mendalam. Dampak operasi militer terhadap kehidupan masyarakat sipil, dinamika lokal, serta kompleksitas motif perlawanan sering kali disederhanakan atau tidak dieksplorasi secara kritis. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan institusional untuk menekankan keberhasilan operasi dan mengurangi ruang bagi narasi yang berpotensi merugikan citra institusi militer.

Karya-karya yang ditulis oleh pelaku sejarah, seperti buku-buku A.H. Nasution, memiliki keunggulan berupa kedekatan langsung penulis dengan peristiwa dan kebijakan militer pada masa itu. Namun, kedekatan tersebut juga membawa konsekuensi berupa subjektivitas.

Nasution menulis dari posisi sebagai perwira tinggi dan perumus doktrin pertahanan, sehingga interpretasi yang disajikan sering kali membenarkan dominasi Angkatan Darat dalam kehidupan politik serta menempatkan kebijakan militer sebagai solusi utama dalam menghadapi konflik internal. Oleh karena itu, meskipun informatif, buku-buku ini perlu dibaca dengan mempertimbangkan latar kepentingan politik dan ideologis penulisnya.

Buku-buku lokal yang membahas Kahar Muzakkar, seperti karya Jo' Kojongjan serta A. Wanua Tangke dan A. Wanus Tangke, menyajikan perspektif yang berbeda karena lebih menekankan pengalaman lokal, kesaksian personal, dan ingatan kolektif masyarakat. Dari sisi kritik intern, buku-buku ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap dimensi kemanusiaan dan kultural Kahar Muzakkar yang sering absen dalam narasi resmi negara. Namun demikian, narasi yang disajikan tidak jarang bersifat emosional, apologetik, atau spekulatif, terutama dalam pembahasan mengenai kematian Kahar Muzakkar dan loyalitas pengikutnya. Kecenderungan romantisasi terhadap figur Kahar Muzakkar perlu diwaspadai agar tidak mengaburkan analisis historis yang objektif.

Sementara itu, buku-buku akademik karya sejarawan dan ilmuwan politik seperti Barbara S. Harvey, C. van Dijk, Harold Crouch, Ulf Sundhaussen, dan Anhar Gonggong menawarkan kerangka analisis yang lebih konseptual dan kritis. Dari sudut kritik intern, kekuatan utama buku-buku ini terletak pada penggunaan metodologi ilmiah, perbandingan sumber, serta upaya memahami konflik DI/TII dalam konteks yang lebih luas, seperti relasi pusat–daerah, integrasi militer, dan dinamika politik nasional. Namun, keterbatasan buku-buku akademik ini terletak pada jarak penulis dengan pengalaman langsung di lapangan, serta kecenderungan

generalisasi yang terkadang kurang menangkap nuansa sosial dan budaya lokal Sulawesi Selatan.

3) Foto

Foto-foto yang terlampir dalam penelitian ini merupakan kumpulan dokumentasi visual mengenai operasi penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar di wilayah Sulawesi Selatan. Di dalam foto-foto tersebut tergambar berbagai elemen penting, seperti keberadaan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI), lokasi tempat tinggal atau persembunyian Kahar Muzakkar, senjata-senjata yang digunakan oleh kelompok DI/TII, serta surat-surat dan dokumen yang dibuat atau dikaitkan dengan Kahar Muzakkar. Unsur-unsur visual tersebut memberikan gambaran konkret mengenai kondisi konflik, aktor yang terlibat, serta sarana material yang digunakan dalam peristiwa tersebut.

Namun, dari sudut pandang kritik intern, foto-foto tersebut tidak dapat dipahami sebagai representasi objektif dan menyeluruh atas realitas sejarah. Foto merupakan hasil dari proses seleksi dan pengambilan sudut pandang tertentu, yang dalam konteks ini sangat dipengaruhi oleh kepentingan dokumentasi militer. Sebagian besar foto diambil dalam kerangka operasi keamanan negara, sehingga visual yang ditampilkan cenderung menonjolkan keberhasilan TNI, legitimasi tindakan militer, serta kondisi pasca-operasi, seperti perampasan senjata atau penguasaan wilayah.

Kehadiran pasukan TNI dalam foto-foto tersebut sering kali ditampilkan secara dominan, baik melalui pose formal, penguasaan ruang, maupun simbol-simbol kekuasaan negara. Sebaliknya, representasi pihak DI/TII umumnya muncul dalam posisi yang pasif, seperti senjata yang telah dirampas, lokasi persembunyian yang ditinggalkan, atau dokumen yang disita. Hal ini menunjukkan bahwa

foto-foto tersebut lebih banyak merekam perspektif negara daripada dinamika internal gerakan Kahar Muzakkar atau pengalaman masyarakat sipil yang terdampak konflik.

Selain itu, beberapa foto tidak disertai keterangan lengkap mengenai waktu, lokasi spesifik, serta konteks peristiwa yang melatarbelakangi pengambilan gambar. Keterbatasan informasi ini menimbulkan potensi ambiguitas dalam penafsiran, terutama ketika foto digunakan untuk merekonstruksi kronologi atau hubungan sebab-akibat suatu peristiwa. Oleh karena itu, foto-foto tersebut tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti utama, melainkan harus ditafsirkan dengan bantuan sumber tertulis, baik berupa dokumen militer, arsip resmi, maupun kesaksian tertulis.

Surat-surat dan dokumen visual yang dikaitkan dengan Kahar Muzakkar dalam foto juga perlu dianalisis secara kritis. Dokumen tersebut umumnya ditampilkan sebagai barang sitaan, sehingga makna dan konteks pembuatannya telah terlepas dari situasi awal ketika dokumen itu digunakan. Tanpa penjelasan yang memadai mengenai isi, tujuan, dan konteks penulisan, dokumen visual semacam ini berpotensi ditafsirkan secara sepihak sesuai narasi resmi operasi militer.

3. Interpretasi (Analisis dan Sintesis)

Interpretasi adalah tahap menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal.²² Dalam tahap ini penulis akan melakukan penafsiran dengan mengaitkan segala fakta dari berbagai sumber yang didapat. Penafsiran ini dilakukan dengan mengurutkan fakta-fakta sejarah secara kronologis dengan

²² Anton Dwi Laksono, *Apa itu Sejarah: pengertian, ruang lingkup, metode dan penelitian*, (Pontianak: Derwati Press, 2018), hal. 109

menitikberatkan pada kausalitas antar fakta. Proses penafsiran atau interpretasi inilah yang digunakan penulis sejarah untuk menyusun simpulan akhir yang nantinya akan menjadi pondasi dalam mencapai hasil penelitian berupa rekonstruksi sejarah.²³

Pada tahap ini, penulis merujuk pada Teori Kontrainsurgensi yang diusulkan oleh David Galula dan Robert Thompson, yang berpendapat bahwa upaya untuk menanggulangi pemberontakan atau insurgensi memerlukan strategi yang menyeluruh, menggabungkan elemen militer, politik, psikologis, dan sosial. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan kontrainsurgensi tidak hanya tergantung pada kekuatan angkatan bersenjata, tetapi juga pada kemampuan untuk meraih bantuan masyarakat sipil dan meruntuhkan moral serta jaringan pemberontak.

Galula, dalam karyanya *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice*, menyatakan bahwa strategi kontrainsurgensi harus meliputi operasi militer yang terorganisir, intelijen yang mumpuni, serta upaya untuk memisahkan pemberontak dari basis dukungan mereka di masyarakat.²⁴ Di sisi lain, Thompson menekankan pentingnya sinergi antara operasi militer dan inisiatif politik dalam menghadapi insurgensi, termasuk penerapan propaganda dan reformasi sosial untuk mengurangi ketidakpuasan yang dimanfaatkan oleh pemberontak.²⁵

Dalam kerangka Teori Kontrainsurgensi, Batalyon 330 mengambil peran sentral dalam penanganan pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Batalyon ini tidak hanya menerapkan taktik militer konvensional seperti operasi pencarian dan pemusnahan untuk menghilangkan basis-basis pemberontak, tetapi juga menggunakan pendekatan psikologis melalui propaganda dan usaha untuk memenangkan

²³ Aditia Muara Padiatra, *Ilmu Sejarah: Metode dan Praktik* (Gresik: CV Jendela Sastra Indonesia Press, 2020), 84-85.

²⁴ David Galula, *Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice* (New York: Praeger, 1964), hlm. 45-50

²⁵ Robert Thompson, *Defeating Communist Insurgency: Experiences from Malaya and Vietnam* (London: Chatto & Windus, 1966), hlm. 30-35

hati masyarakat sipil. Strategi ini selaras dengan prinsip-prinsip kontrainsurjensi yang diajukan oleh Galula dan Thompson, di mana sukses operasi militer terikat pada kemampuan untuk meraih dukungan masyarakat dan melemahkan kekuatan pemberontak secara psikologis.²⁶

Teori Kontrainsurjensi juga relevan dalam menganalisa bagaimana Batalyon 330 sukses mengintegrasikan operasi militer dengan usaha intelijen dan pendekatan sosial. Misalnya, Batalyon 330 melakukan operasi intelijen untuk mengidentifikasi dan menetralsir jaringan pemberontak, sambil secara paralel mendekati masyarakat sipil untuk meminimalkan dukungan mereka terhadap Kahar Muzakkar. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kontrainsurjensi yang menekankan kombinasi antara kekuatan militer dan usaha non-militer untuk mencapai tujuan strategis.²⁷

Dalam konteks Teori Kontrainsurjensi, keberhasilan Batalyon 330 dalam menanggulangi pemberontakan Kahar Muzakkar dapat dipandang sebagai contoh bagaimana strategi kontrainsurjensi yang terintegrasi dapat mengatasi ancaman bagi keamanan nasional. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana Batalyon 330 tidak hanya fokus pada aspek militer, tetapi juga mempertimbangkan elemen psikologis dan sosial dalam menghadapi pemberontakan.

4. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Setelah menyelesaikan proses pencarian dan pengumpulan sumber, kritik terhadap sumber, dan interpretasi atau penafsiran, maka selanjutnya adalah tahapan akhir dalam metode penelitian sejarah, yakni historiografi. Tahapan historiografi ini adalah tahapan akhir dalam langkah penelitian sejarah Atau dalam tahapan metode penelitian sejarah. Dalam tahap ini seorang peneliti akan menuliskan hasil yang telah didapatkan dari proses-

²⁶ Abdul Haris Nasution, *Memenuhi Panggilan Tugas*. hal 148-150

²⁷ Cornelis Van Dijk, *Rebellion Under the Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia.*, hal 115-120

proses yang telah dilaluinya meliputi heuristik, kritik dan interpretasi. Atau dengan kata lain historiografi ini merupakan tahap rekonstruksi peristiwa dari sumber-sumber mengenai peristiwa masa lalu di mana semuanya berpatok pada fakta-fakta yang telah didapatkan.²⁸

Sistematika penulisan dengan judul “Peran Batalyon 330 dalam Pemberontakan Kahar Muzakkar Tahun 1964-1965” ditulis menjadi beberapa bagian secara sistematis, sebagai berikut :

BAB 1, bagian ini merupakan bagian yang menghimpun pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang mencakup tahap heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

BAB II, bagian ini akan membahas mengenai sejarah pembentukan batalyon 330 kujang I/Siliwangi.

BAB III, bagian ini akan membahas Peran Batalyon 330 dalam Penumpasan Pemberontakan Kahar Muzakkar dari 1964-1965 yang terdiri dari operasi batalyon 330 dalam penumpasan pemberontakan Kahar Muzakkar.

BAB IV, bab ini berisi penutup. Dalam kesimpulan berisikan mengenai apa yang didapatkan dari penelitian ini dan menjadi jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Pada bagian ini terdapat daftar sumber, saran, dan lampiran yang dipakai dalam proses penelitian.

²⁸ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah.*, hal. 147